KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Z1NK6F6S

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/TIDAR FINAL			., 5.		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 1 8 5 8			H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 A Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	AN YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : 68 807 563 9 722 000							
A.2 NIK : The state of the stat							
A.3 Nama : SUDARMADI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5	21-402-01	1.780.000	1.780.000	0	5	89.000	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Bukti Pembayaran  Tanggal 1 0 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
	:		2 7 2 2  RAH ATMA HUSADA MAHAK  2 0 2 2  2 0 2 2  2 0 2 2  2 0 2 2	0 0 0 0	IMANTAN	TIMUR	
C.6 Pernyataan \	Wajib Pajak :	tandatangani secara elektronik	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak	·	Ū	ŕ	
	The state of the s						